

RI bisa raup US\$1,11 miliar dari DTO

Usulan 30% muatan ekspor untuk kapal nasional direspons positif

JAKARTA: Kebijakan domestic transporter obligation (DTO) yang mengalokasikan 30% pengangkutan batu bara ekspor untuk kapal nasional diperkirakan memberikan kontribusi US\$1,11 miliar per tahun.

Berdasarkan hasil kajian Indonesian National Shipowners' Association (INSA), potensi penerimaan negara itu berasal dari pajak sebesar US\$25,64 juta dan total ongkos angkut sekitar US\$1,09 miliar per tahun.

Ketua Bidang Pengembangan Industri Pelayaran DPP INSA Ibnu Wibowo mengungkapkan perhitungan itu berdasarkan asumsi volume ekspor batu bara nasional pada tahun ini mencapai 220 juta ton.

Menurut dia, penerapan kebijakan DTO akan menguntungkan Pemerintah Indonesia karena penyerapan penerimaan negara yang bersumber dari sektor pengangkutan komoditas ekspor semakin optimal.

"Dengan memberlakukan DTO sebesar 30%, negara akan mendapatkan kenaikan pendapatan sebesar US\$1,11 miliar yang bersumber dari pajak US\$25,64 juta dan biaya angkut sekitar US\$1,09 miliar," katanya kepada Bisnis kemarin.

Oleh karena itu, paparnya, perusahaan pelayaran nasional mengharapkan political will dari pemerintah dengan semangat menurunkan defisit neraca pembayaran jasa transportasi laut untuk menata kembali ekspor batu bara melalui konsep DTO.

DTO adalah kebijakan yang mewajibkan eksportir atau pemilik barang ekspor menyisihkan 30% muatannya untuk diangkut oleh perusahaan pelayaran nasional dengan menggunakan kapal berbendera Merah Putih.

Kementerian Perhubungan merespons positif usulan pemberlakuan DTO untuk komoditas ekspor yang dinilai juga menguntungkan pelaku usaha pelayaran nasional karena peluang investasi di sektor pengadaan kapal semakin besar.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub Leon Muhamad mengatakan usulan itu dapat ditindaklanjuti, apalagi saat ini instansinya sedang mencari terobosan untuk memperbesar pangsa muatan pelayaran nasional dengan mengincar muatan ekspor.

"Usulan itu nantinya bisa dibahas karena memang kini angkutan ekspor batu bara masih dikuasai oleh pelayaran asing," tutur Leon.

Potensi kerugian

Pelaku usaha pelayaran pernah memproyeksikan kerugian akibat penerapan sistem free on board (FOB) dalam perdagangan ekspor komoditas batu bara nasional pada tahun ini mencapai US\$4,95 miliar.

Bahkan, jumlah itu berpotensi bertambah jika pada semester II tahun ini biaya angkut (freight) batu bara dari Indonesia ke luar negeri terus meningkat seiring naiknya permintaan dari China dan Jepang atas komoditas tambang tersebut.

Pasalnya, dalam sistem FOB, kapal berbendera Indonesia yang mengangkut komoditas ekspor ke luar negeri sangat minim.

Berdasarkan data Kemenhub, hingga 2009 perusahaan pelayaran nasional baru menguasai 9% dari total pangsa muatan ekspor sebanyak 551 juta ton.

Sementara itu, berdasarkan analisis Bappenas, dengan 92,9% muatan ekspor dan impor dari total pangsa muatan luar negeri sebanyak 536,4 juta ton pada 2009 yang diangkut oleh kapal asing, terdapat defisit transaksi jasa angkutan laut sebesar US\$19,5 miliar.

Ibnu mengungkapkan pada tahun ini volume ekspor batu bara nasional diperkirakan mencapai 220 juta ton dari total produksi sebanyak 300 juta, sedangkan sisanya sebanyak 80 juta ton untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri.

Menurut dia, kerugian akibat penerapan sistem perdagangan FOB yang lebih menguntungkan pembeli dibandingkan dengan pemilik barang itu meningkat secara signifikan dibandingkan dengan posisi 2008.

"Saat itu, nilai ekspor batu bara nasional diperkirakan mencapai 160 juta ton dengan 10% di antaranya dikuasai oleh kapal nasional sehingga kerugian akibat penerapan FSO pada tahun ini bisa mencapai US\$4,95 miliar," tutur Ibnu yang juga sebagai Direktur Utama PT PANN Multifinance.

Dia menjelaskan potensi kerugian itu dihitung berdasarkan tarif angkutan batu bara dari Indonesia ke luar negeri, seperti Kalimantan-China rata-rata US\$25 per ton. (*tularji@bisnis.co.id*)

Oleh **Tularji**
Bisnis Indonesia